



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 04 Oktober 2022

Halaman: 4

<b>TAJUK</b>	<p style="text-align: center;"><b>Ratusan Kasus KDRT Butuh Penanganan Komprehensif</b></p> <p><b>K</b>asus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah DIY tercatat ratusan. Data ini diungkap oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja menyebut sampai dengan Agustus 2022 ini telah terjadi 156 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah DIY.</p> <p>Data tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Dari jumlah kasus itu, sebanyak 24 masuk ke meja persidangan.</p> <p>Khusus di Kota Jogja ada sistem pendampingan korban KDRT bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Peradi akan fokus memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum kepada korban KDRT.</p> <p>Menurut data dalam SIGA KDRT tidak hanya dialami oleh perempuan saja, tetapi juga anak-anak. Bahkan belakangan, kasus KDRT juga dibarengi dengan kekerasan seksual. Data yang tercatat itu adalah data gabungan yang masuk ke berbagai lembaga yang menangani KDRT.</p> <p>Lebih rinci peran Peradi tidak hanya mendampingi korban KDRT di tingkat pengadilan, tetapi juga memberikan pertimbangan dan referensi hukum.</p> <p>Apa yang dilakukan Pemkot Jogja patut diapresiasi. Pelibatan Peradi untuk pendampingan kasus KDRT sudah tepat. Di sisi lain, warga yang terkena kasus KDRT memang butuh pendampingan dan pertimbangan hukum, agar mereka merasa aman dan tepat menentukan langkah yang harus diambil.</p> <p>Namun di sisi lain, jangan lupa, penanganan KDRT bukan hanya pendampingan dari sisi hukum saja. KDRT merupakan masalah sosial yang tidak bisa sekadar diselesaikan dari satu sisi.</p> <p>Perlu langkah komprehensif dan berkelanjutan yang harus disusun pemerintah. Pelibatan masyarakat sangat penting dilakukan terutama tingkat terkecil dalam keluarga.</p> <p>Langkah paling awal yang harus dilakukan pemerintah adalah memetakan persoalan. KDRT ini bisa jadi adalah eksem masalah sosial, salah satunya kemiskinan.</p> <p>Selain itu masih ada persoalan lain terkait dengan akses, edukasi dan lingkungan sosial. Budaya masyarakat setempat juga berkontribusi pada maraknya kasus KDRT. Ada banyak faktor yang mendorong tingginya tingkat kasus KDRT, apalagi yang melibatkan anak-anak. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota di DIY harus segera menyusun sistem penanganannya. Sistem yang komprehensif melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Jangan anggap KDRT sudah selesai jika sudah dirampungkan secara hukum.</p>
--------------	---

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005